

ANALISIS EFEKTIVITAS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus pada Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari)

Muhammad Syougi, Baroroh Lestari, Maulana Agung P

ABSTRACT

One of the *Corporate Social Responsibility* program in BUMN is the Partnership Program. Partnership Program is a program designed specifically for Micro, Small and medium enterprise development to be sustainable, self sufficient and have competitive power using funds benefit from BUMN profits. The purpose of this reasearch are to describe effectiveness of BUMN partnership program that have been implemented by PT. Perkebunan Nusantara VII. The type of this research is descriptive by using kualitatif approaching. Analyse effectiveness of Partnership Program which contain of two indicators: first accuracy of implementation BUMN Partnership Program and the second is micro, small and medium enterprise growth, with nine informan, they are four people from PKBL staff of PT. Perkebunan Nusantara VII, Unit Usaha Rejosari branch and five people from micro, small and medium enterprise Partnership Program.

According to the result of research done by using interview, observation and documentation so the researcher can conclude that Effectivenees of Partnership Program in the micro, small and medium enterprise growth has rans effectively and accordance with the objectives of the Partnership Program, all can be proved from the conclusions from each indicator of the effectiveness. The rekomendasi for Partnership Program PT. Perkebunan Nusantara VII is to evaluate the results of the Partnership training program that has been given for development of micro, small and medium enterprise Partnership Program, micro, small and medium enterprise also need to be trained for mastery of information technology not only management training, and micro, small and medium enterprise Partnership Program must provide monthly financial reports to PT. Perkebunan Nusantara VII.

Key words: Effectivenees, Partnership Program, micro small and medium enterprise, PTPN VII.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran, dan fungsi yang strategis serta tanggung jawab terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi tugas BUMN. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa "Dunia usaha (*corporation*) berperan serta menumbuhkan iklim usaha kondusif, yaitu dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan." Bukan hanya BUMN yang mempunyai peran penting tapi usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi.

Korespondensi:

Muhammad Syougi, Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35111, Indonesia. Email: Assegaffams@yahoo.com

Tetapi kenyataannya sekarang ini di Indonesia, UMKM sulit untuk berkembang. Banyak UMKM yang *collapse* dan tidak mampu bertahan dengan kondisi global seperti sekarang ini. Ketidakmampuan UMKM dalam menghadapi era globalisasi yang berorientasi pada mekanisme pasar sekarang ini memang cukup beralasan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam UMKM tersebut.

Menurut Wardoyo (2005), salah satu permasalahan utama UMKM dalam mengembangkan usaha untuk menghadapi pasar global adalah karena lemahnya hal permodalan. Menurut Rosid dalam Modul manajemen (2008), Kurangnya modal adalah faktor utama yang paling berperan dan diperlukan dalam mengembangkan UMKM. Sektor UMKM ini mempunyai kendala dalam permodalan, dikarenakan dimulainya usaha dengan modal yang terbatas dan bersifat modal pribadi dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Sumber permodalan UMKM sebenarnya bisa berasal dari pemerintah dan non-pemerintah seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Sumber Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2009
Sulitnya akses terhadap bantuan permodalan berupa kredit dari lembaga keuangan menjadi salah satu penyebab masalah permodalan belum bisa teratasi. Berdasarkan Gambar 1, yang menarik untuk dianalisis adalah sumber modal yang berasal dari perusahaan swasta atau BUMN melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan memberikan *Soft Loan* pada sektor usaha mikro dan kecil, karena selama ini yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kredit hanya bisa diperoleh di lembaga keuangan .

Dalam praktek tanggung jawab sosial ini, BUMN memiliki program khusus yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki tugas yang berbeda, Program Kemitraan merupakan suatu program yang dirancang untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan pembinaan kepada UMKM.

Kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan pinjaman modal dari BUMN adalah relatif lebih sederhana, lebih murah biaya administrasinya dan lebih pengajuan proposal usaha dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat di **Tabel 1**.

Tabel 1. Perbedaan Pinjaman Dana

No	Perbedaan	
	Bank	Program Kemitraan BUMN
1	Bunga Pinjaman > 6% per tahun	Bunga Pinjaman sebesar 6% pertahun dengan sistem Flat
2	Tidak ada Pelatihan untuk Perkembangan Usaha	Diberikan Pelatihan manajemen usaha pada mitra binaan
3	Jangka waktu pengembalian pinjaman tergantung pada kebijakan dari bank	Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 bulan tidak tergantung pada perbedaan jumlah pinjaman
4	Menggunakan jasa Debt Colector pada saat penagihan hutang secara langsung bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran	Proses penagihan hutang hanya melibatkan staf PKBL dan staf (KP2LN) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat
5	Memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melakukan penyitaan terhadap agunan yang telah di jaminkan	Tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penyitaan terhadap agunan yang telah di jaminkan

Sumber : Prisiilan, 2008. Analisis Efektifitas CSR dalam PKBL, Surabaya: Universitas Hang Tuah.

Seperti yang terlihat di Tabel 1 perbedaan pinjaman bank dan program kemitraan, pinjaman yang berasal dari program kemitraan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan yang berasal dari bank. Namun dalam kenyataannya bantuan kredit melalui program kemitraan masih belum banyak diketahui pelaku UMKM. Padahal program kemitraan BUMN merupakan sumber daya potensial yang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah permodalan yang selama ini dihadapi oleh sektor mikro dalam mengembangkan usahanya.

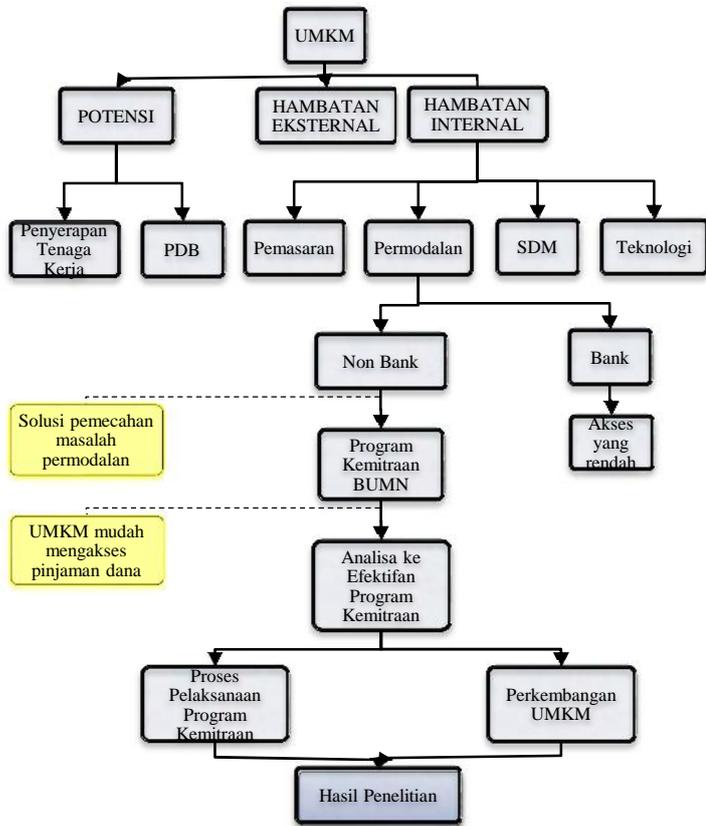
Pada intinya program ini dibuat untuk pemanfaatan dana BUMN untuk UMKM dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari mampu menampung banyak UMKM Mitra Binaan, tetapi kenyataannya masih saja terjadi kredit macet pada pembayaran anggurannya, oleh karena itu harus dilakukan analisis keefektifan programnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan efektivitas Program Kemitraan terhadap peembangan UMKM sektor industri yang menjadi mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.

- Mendesripsikan faktor yang menghambat tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.
- Mendesripsikan faktor yang mendukung tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.

Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian di atas, dimulai dari UMKM yang merupakan obyek penelitian ini. UMKM mempunyai keunggulan-keunggulan yang dapat memperbaiki dan menopang perekonomian negara seperti yang telah dijelaskan di latar belakang tetapi dalam kenyataannya di Indonesia UMKM sulit untuk berkembang. Hambatan-hambatan dalam UMKM dapat di bagi menjadi dua yaitu Hambatan Eksternal dan Hambatan Internal. Berdasarkan hambatan yang telah dijabarkan di atas, bahwa hambatan yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap perkembangan UMKM adalah hambatan dari segi permodalan.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya sumber modal yang berasal dari Bank dan Non Bank. Sumber modal yang berasal dari Non Bank dalam penelitian ini adalah BUMN. Badan Usaha Milik Negara ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan sumber modal yang berasal dari Bank. Sumber Modal yang berasal dari BUMN

tersebut merupakan program CSR yang dikanal dengan istilah PKBL.

Dalam setiap program yang dilaksanakan oleh BUMN perlu dinilai keefektifannya, agar dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini hanya menggunakan satu variabel mandiri yaitu efektivitas program. Dalam penelitian ini, efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara proses pelaksanaan Program Kemitraan dengan hasil yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dari program kemitraan, yang pada penelitian adalah perkembangan UMKM yang menjadi Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dalam penelitian ini digunakan dua fokus penelitian yaitu: Proses Pelaksanaan Program Kemitraan dan Dampaknya terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan.

Indikator dari fokus penelitian Proses pelaksanaan Program Kemitraan yaitu: Ketepatan pemilihan calon Mitra Binaan, ketepatan penentuan jumlah pinjaman, ketepatan proses penyaluran dana, tata cara penagihan angsuran, ketepatan pembayaran angsuran pinjaman, tindakan yang dilakukan terkait dengan kredit macet pembayaran angsuran, ketepatan pemanfaatan dana operasional, upaya yang dilakukan untuk perkembangan UMKM Mitra Binaan dan ketepatan bentuk pelatihan UMKM Mitra Binaan. Sedangkan indikator dari fokus penelitian kedua yaitu perkembangan UMKM Mitra Binaan adalah dampak setelah mengikuti pembinaan Program Kemitraan, peningkatan laba dalam usaha, peningkatan tenaga kerja, peningkatan pemanfaatan teknologi dan peningkatan jumlah pelanggan.

Sesuai dengan dua fokus penelitian tersebut, informannya juga dibagi menjadi dua bagian. Informan fokus pertama yaitu Pihak PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII yang berjumlah 4 (empat) orang dan 5 (lima) orang informan dari Fokus Penelitian ke dua yaitu pemilik UMKM yang menjadi Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer didapat dari wawancara atau interview dan

observasi sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Cara untuk mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan menyusun dan mengelompokkan data yang ada dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga memberikan gambaran nyata di lapangan terhadap informan yang telah diteliti.

Menurut Moleong (2006) “Suatu studi tidak akan valid jika tidak reliabel, maka penelitian kualitatif tidak akan bisa transferabel jika tidak kredibel. Perlu kiranya dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan.” Maka Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan pada teori efektivitas yang dinilai dari dua sudut pandang efektivitas Program Kemitraan. Pertama, mengenai efektifitas berdasarkan pelaksanaan Program Kemitraan dan yang kedua adalah efektifitas dari hasil yang dicapai Program Kemitraan yaitu perkembangan UMKM yang menjadi mitra binaan PTPN VII.

A. HASIL

3.1 Proses Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII.

3.1.1. Ketepatan Pemilihan Calon Mitra Binaan.

Metode analisis 5C yang digunakan PTPN VII dalam menentukan calon Mitra Binaan tidak terlalu efektif karena filosofi awal dari Program Kemitraan adalah bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah sehingga berkembang menjadi mandiri dan tangguh dalam dunia bisnis sekarang ini. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang ditetapkan PTPN VII dalam pemilihan calon Mitra Binaan. Calon Mitra Binaan dapat mengajukan pinjaman modal melalui PTPN VII yang terdekat dari tempat tinggal dan tempat usahanya.

3.1.2. Ketepatan Penentuan Jumlah Pinjaman.

Perusahaan PTPN VII tidak menentukan indikator khusus dalam penentuan besarnya pinjaman yang akan diberikan ke UMKM. UMKM nya yang pertama mengajukan besarnya pinjaman yang diperlukan setelah itu dilakukan survei oleh pihak PTPN VII untuk dibandingkan kenyataan dan laporan keuangan yang ada di dalam proposal, baru ditentukan seberapa besar untuk pinjamannya berdasarkan skala yang telah ditentukan oleh PTPN VII. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII skala jumlah pinjaman dibagi menjadi dua, skala mikro 1- 10 juta dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 10-50 juta.

Skala mikro pinjaman diberikan kepada usaha kelompok dan dananya tidak dibebankan oleh anggunan. Berbeda dengan skala mikro, UKM diwajibkan menggunakan anggunan, sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian. Calon UKM yang mengajukan pinjaman dengan anggunan dapat mendaftarkan anggunan milik orang lain dengan syarat pemilik anggunan bersedia menandatangani surat perjanjian dengan PTPN VII, jika pihak pertama (UKM mitra binaan) terjadi kredit macet maka PTPN VII berhak menyita anggunan yang di daftarkan oleh UKM calon Mitra Binaan.

Anggunan tersebut digunakan hanya sebagai ikatan moral dan bersifat formalitas bagi UKM Mitra Binaan untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana kredit Program Kemitraan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit macet Program Kemitraan.

3.1.3. Proses Penyaluran Dana Pinjaman.

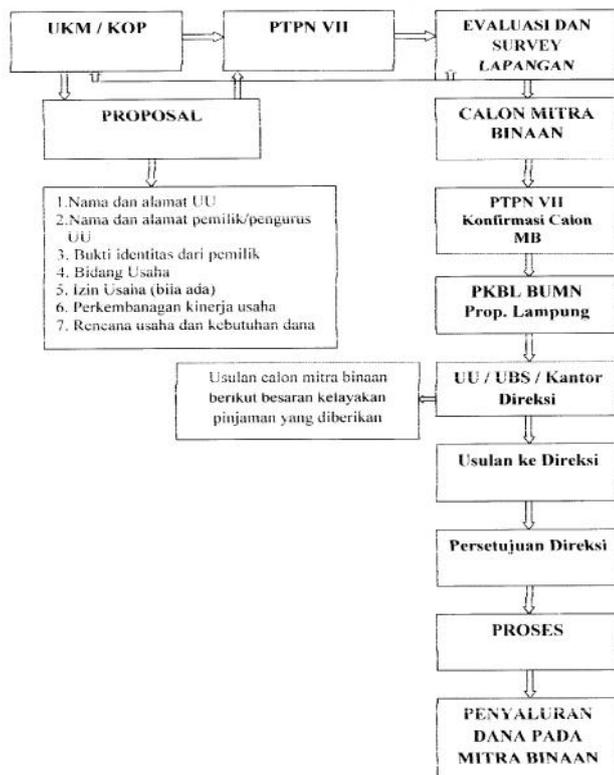
PT. Perkebunan Nusantara VII sudah memiliki standar operasional prosedur penyaluran dana pinjaman sendiri. BCalon Mitra Binaan yang telah memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan pinjaman dana Program Kemitraan dengan menunjukkan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya seperti pada **Gambar 3.** berikut:

Tabel 2.
KWALITAS PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN
MENURUT SEKTOR USAHA TAHUN 2012
UNIT USAHA REJOSARI

No	Kwalitas Pinjaman	Sek. Industri		Sek. Perdagangan		Sektor Jasa		Mikro		Jumlah	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.
1	Lunas	2	45.000.000	6	82.500.000	3	45.000.000	6	16.500.000	17	189.000.000
2	Lancar	2	6.025.500	2	145.566.665	0		8	3.650.000	12	155.242.165
3	Kurang Lancar	0		1	3.790.000	0		5	5.015.000	6	8.805.000
4	Diragukan									0	0
5	Macet	1	20.000.000	1						2	297.222.222
6	Blm. Jatuh Tempo									0	0
7	Pinj. Bermasalah										
	Jumlah	5	71.025.500	10	241.578.887	3	45.000.000	19	25.165.000	37	382.769.387

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara VII. 2012.

Gambar 3.
Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana
Kemitraan



Sumber: PT. Perkebunan Nusantara VII. 2012.

Untuk melakukan permohonan juga, UMKM tidak harus mengajukan ke Unit Usaha PTPN VII terdekat, tetapi juga bisa pengajuan langsung ke Kantor Direksi PTPN VII. Prosedur yang juga cukup panjang ini membuat lama waktu dari mulai permohonan pinjaman dana Program Kemitraan sampai pencairan dana. Menurut penuturan UMKM Mitra Binaan dana yang dibutuhkan lama pencairannya. Paling cepat pencairan dananya setelah pengajuan proposal sekitar enam bulan. Untuk melakukan pinjaman tahap II pun harus

mengikuti prosedur awal kembali. Sudah semestinya, PTPN VII tidak perlu melakukan survei lapangan kembali. Karena pada waktu tahap pertama tiap bulannya dilakukan survei pengembangan kepada Mitra Binaan, otomatis PTPN VII sudah mengenal baik Mitra binaan tersebut.

3.1.4. Tata Cara Penagihan Angsuran.

Tata cara penagihan angsuran PTPN VII sudah sesuai dengan prosedurnya. PTPN VII tidak langsung menerima uang angsurannya tapi pembayaran angsuran pinjaman oleh Mitra Binaan diakses melalui bank. Jadi PTPN VII hanya perlu melihat struk bukti pembayaran angsuran ke UMKM Mitra Binaan. Tujuannya adalah mempermudah Mitra Binaan dalam proses pembayaran. PTPN VII juga memberikan banyak sekali toleransi kepada Mitra Binaan, mengingat Program Kemitraan ini merupakan program yang berasaskan bantuan dan pembinaan masyarakat sekitar, bukan program yang semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan.

3.1.5. Ketepatan Pembayaran Angsuran Pinjaman.

Ketepatan pelaku UMKM dalam membayar angsuran dan melunasi pinjaman sudah cukup baik dan tepat waktu, meskipun ada beberapa UMKM yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dalam proses ini, tolak ukur keberhasilannya berupa ketepatan waktu dari mitra untuk membayar angsurannya, seperti yang dijelaskan buku pedoman PKBL.

Pembayaran angsuran pada Program Kemitraan yang dilakukan PTPN VII tidak harus sesuai

dengan jumlah yang ditetapkan di awal kontrak perjanjian, dengan pembayaran angsuran yang dibawah batas angsuran juga tidak dipermasalahkan oleh PTPN VII, yang penting pada setiap bulannya ada pembayaran angsuran setoran dari UMKM Mitra Binaan. Berdasarkan Pada **Tabel 2**, dalam pelaksanaannya selama ini UMKM sudah banyak yang sudah lunas sebelum masa anggurannya selesai. Pembayaran angsuran yang fleksibel dan tidak dipaksa menjadi daya tarik bagi UMKM yang ingin bermitra dengan PTPN VII.

3.1.6. Tindakan yang dilakukan Terkait dengan Kredit Macet Pembayaran Angsuran.

Dalam proses ini ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari proses ini adalah ketepatan cara penagihan dan ketepatan dalam memberikan solusi terhadap masalah mitra binaan sehingga tidak terjadi kemacetan pembayaran angsuran kembali. Tindakan yang dilakukan pihak PTPN VII terhadap mitra binaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran adalah mengidentifikasi masalah kemacetan pembayaran tersebut terlebih dahulu lalu perumusan masalah-masalah atau kendala yang di hadapi Mitra Binaan, kemudian dilakukanlah pencarian solusi terbaik untuk dapat memecahkan masalah keterlambatan pembayaran angsuran ini. Dalam penagihan UMKM yang telat dalam pembayaran angsuran, PTPN VII Tidak ada tekanan dalam pengembalian modal usaha oleh pihak PTPN VII terhadap mitra binaan. Sistem penagihannya angsuran PTPN VII fleksibel, perusahaan ini memberikan toleransi keterlambatan pembayaran dengan jangka waktu 4 bulan. Hal ini merupakan wujud kepedulian PTPN VII kepada para Mitra Binaannya. Berikut penuturan Bapak Khairil (Krani Program Kemitraan PTPN VII Unit Usaha Rejosari):

“PTPN sih fleksibel aja, jika sudah di cek kendalanya yah dilakukan pembinaan, dicari tau pemecahan masalahnya gimana, kan semua itu pasti ada alasannya kenapa UMK telat bayarnya, bisa jadi kan si UMKM ada keperluan untuk pengembangannya, makanya gak dibayar cicilannya itu. Itu kan wajar, jadi fleksibel aja kita mah. PTP juga kan bukan untuk cari untung kok”. (wawancara 06-11-2012).

Walaupun juga pada kenyataannya ,PTPN VII hanya dapat menahan agunan asli Sertifikat Tanah/asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dianggunkan oleh UKM Mitra Binaan tetapi tidak dapat menjual agungannya tersebut, karena PTPN VII bukan lembaga perbankan yang bisnis intinya menghimpun dan

menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Agunan tersebut dapat dikembalikan apabila Mitra Binaan telah menyelesaikan kewajibannya.

3.1.7. Ketepatan Pemanfaatan Dana Operasional.

Dana operational yang didapat dari bunga pinjaman lunak Program Kemitraan PTPN VII. Bagi UMKM Mitra Binaan, membayar bunga 0,5% tiap bulannya tidak memberatkan pelaku usaha. Dari semua biaya yang besar untuk berbagai pelatihan dan pameran yang dikeluarkan oleh PTPN VII dalam rangka pengembangan UMKM Mitra Binaan tidak sebanding dengan kecilnya bunga 0,5% yang dibayarkan oleh UMKM Mitra Binaan.

Pemanfaatan dana operasional Program Kemitraan sudah sesuai dengan tujuan Program Kemitraan yaitu untuk pengembangan UMKM Mitra Binaan yang mendapatkan modal pinjaman. Pengembangan usaha tersebut berupa pelatihan dan studi banding ke luar daerah serta dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Pemateri dalam pelatihan juga adalah orang yang berkompeten dalam bidang kewirausahaan jadi untuk mengundang pemateri yang berkompeten juga diperlukan biaya yang cukup besar. Setiap ada pelatihan, studi banding dengan UMKM sukses dan Pameran-pameran di Lampung ataupun di luar Lampung seluruh biaya makanan, penginapan dan uang saku tiap harinya selama kegiatan, gratis diberikan oleh PTPN VII.

3.1.8. Upaya yang dilakukan untuk Perkembangan UMKM Mitra Binaan.

Pelatihan yang diberikan oleh PTPN VII adalah suatu bentuk konkrit upaya pembinaan Mitra Binaan. PTPN VII juga menjalin kerjasama dengan Universitas Lampung untuk mengisi acara pelatihan yang berkaitan dengan manajemen dan kewirausahaan. PTPN juga mengajak para mitra binaan untuk mengikuti pameran di Lampung maupun di luar Lampung. Dalam pameran di Lampung ataupun diluar Lampung, biaya operasional dan penyewaan stand pun di berikan gratis kepada mitra binaan. Secara tidak langsung pemasarannya pun dibantu dengan PTPN VII sehingga usaha pengembangan UMKM yang dilakukan PTPN VII sudah baik. Diperjelas dengan pengawasan tiap bulannya oleh petugas PTPN VII terhadap perkembangan UMKM yang bermitra.

3.1.9. Ketepatan Bentuk Pelatihan UMKM Mitra Binaan.

Bentuk pembinaan dan pengembangan usaha Mitra Binaan yaitu melalui pelatihan dan studi banding dengan UMKM yang sudah sukses dalam usahanya, PTPN VII juga memberikan pelatihan yang berkualitas dengan pemateri yang berkompeten di bidangnya dari Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah agar Mitra Binaan PTPN VII benar-benar mendapatkan pengetahuan yang baik dalam mengembangkan usahanya dan termotivasi untuk selalu melakukan inovasi dalam usaha yang ditekuninya.

Pelaku UMKM Mitra Binaan yang ikut pelatihan di Luar daerah adalah UMKM yang berpredikat baik dalam pembayaran angsuran UMKM, minimal sudah tiga bulan mengikuti Program Kemitraan. Untuk pelatihan yang di Lampung, semua UMKM Mitra Binaan bisa ikut dalam Pelatihan pengembangan UMKM menjadi lebih baik. Semua biaya makanan, penginapan dan uang saku diberikan gratis oleh PTPN VII demi menunjang pengembangan UMKM untuk lebih mandiri dan mampu bertahan di era global sekarang ini.

3.1.10. Kesimpulan dari Proses Pelaksanaan Program Kemitraan PTPN VII.

Efektivitas yang ditinjau dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh PTPN VII dalam Program Kemitraan untuk perkembangan UMKM sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan ditetapkan oleh Menteri BUMN. Dalam pelaksanaannya selama ini Program Kemitraan yang telah dilakukan mengarah pada perkembangan UMKM dengan pengawasan pelatihan dan memberikan peluang usaha yang besar khususnya sering mengikutkan mitra usaha dalam setiap pameran. Ketepatan dalam pembayaran UMKM yang bermitra juga sudah baik.

Tanggungjawab PTPN VII dalam Membangun perekonomian masyarakat kecil dan menengah serta meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat sekitar tercermin dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang turut serta secara nyata membantu mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. PTPN VII memberikan pinjaman dengan prosedur dan aturan yang sangat mudah dan sederhana sehingga para pelaku UMKM dapat

mengaksesnya dengan mudah. Selain itu PTPN VII juga akan melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaannya yaitu dengan melakukan pelatihan pengembangan usaha Mitra Binaan. Keunggulan Kompetitif yang dimiliki perusahaan ini adalah adanya toleransi waktu pembayaran angsuran dan pelatihan luar daerah bahkan luar kota terhadap Mitra Binaannya. Program ini telah secara nyata membantu perekonomian masyarakat sekitar.

3.2. Dampak Program Kemitraan PTPN VII dalam Perkembangan UMKM Mitra Binaan

3.2.1. Dampak Setelah Mengikuti Pembinaan Program Kemitraan.

Dampak yang dirasakan UMKM Mitra Binaan setelah mendapat Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh PTPN VII berbeda-beda antara UMKM yang satu dan yang lainnya. Bagi mitra binaan yang terlibat aktif dalam studi banding dan pelatihan, mereka merasakan dampak yang sangat berpengaruh dalam usaha yaitu mereka mengenal sistem cluster, azas koperasi, dan belajar bagaimana mitra binaan bersikap kooperatif, integritas dan intergrasi terhadap sesama mitra binaan. Bagi Mitra Binaan yang tidak terlalu serius, hal yang mereka dapatkan hanyalah memperbanyak teman yaitu sesama Mitra Binaan dan hanya jalan jalan semata. Berikut pernyataan Bapak Nazarudin (Pengusaha Batik dan Sulam Usus Mitra Binaan PTPN VII):

“Pengalaman saya sih setelah pelatihan yang diluar daerah itu banyak manfaatnya, kita bisa meniru cara mereka yang sudah sukses mengembangkan usaha. Mereka biasanya membangun usaha dengan sistem cluster dan menggunakan azas koperasi. makanya mereka bisa kompak dan berkembang dengan cepat, tapi temen temen saya sesama mitra binaan PTPN VII kebanyakan gak dapet apa apa waktu pelatihan, kebanyakan emang gx diterapin mereka sih udah diajarin itu, saya juga gak tau sih kenapa. itu sih menurut saya ya. Karena yang mereka pikirin hanya enak jalan jalannya aja. Enak dapet duit dan nginep hotel gratis sama PTPN VII. Pelatihan yang diberikan gak nempel mas kayaknya. Yah saya juga kerja keras lagi mas buat ngajak mereka jadi seperti mereka yang dijawa”. (wawancara 08-11-2012).

Seharusnya PTPN VII tidak hanya memperhatikan pelatihan yang baik dengan pemateri yang baik pula tetapi PTPN VII juga harus melihat hasil pelatihan dari tiap UMKM yang mengikuti pelatihan, agar bisa menjadi referensi untuk lebih baik kedepannya.

3.2.2. Peningkatan Laba Dalam Usaha.

Bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh PTPN VII tentu saja sangat berperan membantu peningkatan laba usaha. Kenyataannya menunjukkan terdapat kenaikan laba dari UMKM Mitra Binaan dari sebelum mendapat pinjaman dana dari Program Kemitraan PTPN VII. Perbandingan sesudah dapat pinjaman dana, merupakan bukti bahwa terjadi perkembangan usaha Mitra Binaan. Tetapi ada beberapa UMKM yang tidak seberapa signifikan peningkatan labanya, karena modal yang diberikan terlalu sedikit.

Pengaruh besarnya modal juga berpengaruh signifikan, karena dalam dunia bisnis yang kompleks, masih banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM, mulai dari faktor eksternal dan faktor internal usaha, ditambah lagi dengan *entrepreneur skill* masing masing individu berbeda. Jika terjadi penurunan laba, itu disebabkan karena adanya kompetisi usaha yang begitu ketat sehingga mengharuskan Mitra Binaan melakukan peningkatan kualitas bahan baku, sehingga meningkatnya biaya produksi dan berakibat berkurangnya laba usaha.

3.2.3. Peningkatan Tenaga Kerja.

Pada kenyataannya peningkatan tenaga kerja usaha Mitra Binaan tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan, tetapi ada beberapa usaha yang berkurang tenaga kerjanya karena dana yang diberikan oleh PTPN VII digunakan untuk memperbaiki teknologi dalam usaha. Berikut penuturan Bapak Fahrozi (Pengrajin Rotan Mitra Binaan PTPN VII):

“Ada lima orang pegawai, sebelum dapat dana malah lebih banyak jumlah pegawainya, lebih banyak dulu, pada waktu itu belum dikasih pinjaman. Semua itu kan karena peralatannya juga masih manual, otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan makin banyak waktu itu. Setelah dapat pinjaman baru pake mesin jadi pegawainya dikurangi.”. (wawancara 08-11-2012).

Penambahan tenaga kerja biasanya di iringi oleh penambahan jumlah produk yang di produksi. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, peralatan jadi lebih mudah digunakan dan tenaga manusia digantikan dengan mesin otomatis. Setiap perubahan selalu diringi dengan kebaikan dan

keburukan tergantung dari sudut pandang individu masing-masing.

3.2.4. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi.

Program Kemitraan PTPN VII hanya memberikan pinjaman dana dan pelatihan dalam hal teori manajemen dan kewirausahaan. Program kemitraan PTPN VII tidak terlalu membantu dalam penguasaan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk perkembangan dunia bisnis. Sehingga untuk pemanfaatan teknologi yang lebih baik, pelaku UMKM bekerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan peralatan atau teknologi. Kurangnya pemanfaatan teknologi ini seharusnya menjadi salah satu tema pelatihan pengembangan UMKM.

Penguasaan teknologi secara tidak langsung akan menentukan kesinambungan daya saing UMKM dan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan UMKM Mitra Binaan, oleh karena itu PTPN VII selaku penyelenggara harus melakukan pengawasan yang intensif bagi UMKM untuk menerapkan teknologi tepat guna, sertifikasi produk dan standarisasi produk, serta dibentuk unit khusus dalam Program Kemitraan untuk membantu UMKM dalam menstimulan pengembangan inovasi teknologi dan desain.

3.2.5. Peningkatan Jumlah Pelanggan.

Untuk beberapa pelaku UMKM yang bermitra dengan PTPN VII, peningkatan pelanggan tidak terlalu signifikan setelah mendapat pinjaman dana dari PTPN VII. Tetapi UMKM yang mengikuti undangan PTPN VII untuk menghadiri pameran-pameran di Lampung maupun diluar Lampung, merasakan jumlah pelanggan meningkat dan nama usahanya semakin dikenal. Untuk meningkatkan penguasaan pasar bagi UMKM Mitra Binaan, maka perlu adanya perhatian khusus untuk UMKM Mitra Binaan dalam kemudahan akses informasi usaha, melaksanakan promosi dan pengembangan jaringan usaha. Semua dilakukan untuk melindungi UMKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.

3.2.6. Kesimpulan dari dampak Program Kemitraan PTPN VII dalam Perkembangan UMKM Mitra Binaan.

Secara keseluruhan dampak dari Program Kemitraan sangat baik dalam perkembangan UMKM Mitra Binaan. Mulai dari pinjaman lunak

sampai dengan pelatihan UMKM untuk berkembang, tumbuh, bertahan dan menjadi mandiri, telah sesuai dengan visi dan misi Program Kemitraan PTPN VII. Berbagai keunggulan yang terdapat dalam program ini menjadi daya tarik bagi para pelaku UMKM. Para pelaku usaha yang bermitra juga dibantu dalam pemasaran produk-produknya mulai dari mengikuti pameran-pameran secara gratis hingga ke fleksibelnya pembayaran angsuran yang dibebankan kepada Mitra Binaan sehingga UMKM mampu meningkatkan kemampuan usahanya.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan dari masing-masing kesimpulan Fokus penelitian pelaksanaan program dan perkembangan UMKM Mitra Binaan dalam pengukuran tingkat efektivitas Program Kemitraan PTPN VII, dapat disimpulkan:

Efektivitas yang ditinjau dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh PTPN VII dalam Program Kemitraan untuk perkembangan UMKM sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan ditetapkan oleh Menteri BUMN. Dalam pelaksanaannya selama ini Program Kemitraan yang telah dilakukan sudah mengarah pada perkembangan UMKM. Mulai dari pinjaman lunak sampai dengan pelatihan UMKM untuk berkembang, tumbuh, bertahan dan menjadi mandiri, telah sesuai dengan visi dan misi Program Kemitraan PTPN VII.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh beberapa kesimpulan mengenai efektivitas Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari sebagai berikut:

1. efektivitas Program Kemitraan BUMN dalam perkembangan UMKM mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Program Kemitraan yang telah sesuai dengan prosedur Program Kemitraan yang berdampak positif pada Perkembangan UMKM Mitra Binaan.

2. Faktor pendukung efektivitas dari Program Kemitraan PTPN VII yaitu:
 - a. kemudahan untuk mengakses program ini.
 - b. tidak ada batasan atau kisaran pinjaman modal oleh pihak PTPN VII tetapi tetap, peminjam modal dituntut untuk berpikir rasional dalam melakukan pengajuan besarnya modal usaha.
 - c. toleransi waktu yang diberikan PTPN VII dalam hal pembayaran angsuran modal usaha.
 - d. rendahnya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh PTPN VII.
 - e. UMKM Mitra Binaan mendapatkan pembinaan berupa pelatihan pengembangan usaha yang ditekuninya
 - f. Adanya promosi pada UMKM Mitra Binaan melalui pameran di Lampung maupun di luar Lampung.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk faktor yang mendukung dan menghambat Program Kemitraan, antara lain:

1. Bagi pihak Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara VII:
 - a. PTPN VII diharapkan mewajibkan adanya pengiriman laporan keuangan UMKM Mitra Binaan tiap bulan kepada pihak Program Kemitraan sehingga perkembangan usaha UMKM Mitra Binaan dapat dipantau dan memudahkan staf Program Kemitraan dalam membuat Keputusan demi kelancaran usaha Mitra Binaan PTPN VII.
 - b. Pihak Kemitraan PTPN VII seharusnya tidak perlu melakukan survey ulang terhadap pengajuan pinjaman dana tahap II oleh mitra binaan dikarenakan pihak kemitraan telah mempunyai data dari mitra tersebut.
 - c. PTPN VII mewajibkan mencantumkan *Business Plan* dalam Proposal Pengajuan Pinjaman Dana untuk rencana perkembangan produknya, promosinya dan strategi perkembangan usaha selanjutnya, agar semua itu bisa menjadi referensi bagi PTPN VII dalam membina UMKM mitra binaan untuk menjadi lebih baik lagi.
 - d. PTPN VII diharapkan dalam memberikan solusi kepada Mitra Binaan yang mengalami kemacetan angsuran, lebih baik diberikan suatu pembinaan yang mendalam dalam manajemen pemasarannya, karena hanya ada beberapa Mitra Binaan yang di bantu

- pemasaran produknya. Semua itu perlu dilakukan karena banyaknya mitra yang kesulitan menghadapi persaingan dalam dunia usaha.
- e. Untuk meningkatkan penguasaan pasar bagi UMKM Mitra Binaan, maka perlu adanya perhatian khusus dalam kemudahan akses informasi usaha, melaksanakan promosi dan pengembangan jaringan usaha. Semua dilakukan untuk melindungi UMKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.
 - f. PTPN VII selaku penyelenggara harus melakukan pengawasan yang intensif bagi UMKM untuk menerapkan teknologi tepat guna, sertifikasi produk dan standarisasi produk, serta dibentuk unit khusus dalam Program Kemitraan untuk membantu UMKM dalam menstimulan pengembangan inovasi teknologi dan desain.
 - g. UMKM Mitra Binaan diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PTPN VII agar PTPN VII dapat menilai sejauh mana efektif program pelatihan yang diberikan.
2. Bagi UMKM Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII:
- a. UMKM Mitra Binaan Diharapkan dapat memberikan Laporan Keuangan tiap bulan untuk pihak Program Kemitraan PTPN VII sehingga PTPN VII dapat mengetahui perkembangan UMKM.
 - b. UMKM Mitra Binaan diharapkan untuk turut aktif berperan dan melakukan pengawasan dalam Program Kemitraan ini agar tercipta kerjasama yang baik dengan pihak PTPN VII.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (online) (<http://www.bi.go.id/> , diakses tanggal 18 September 2012).
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Replublik Indonesia. Data perbandingan Usaha besar dan UMKM di indonesia, 2009. (Online) (<http://www.depkop.go.id/>, Diakses tanggal 18 September 2012).
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Prisilla, Cindy. 2008 . *Analisis Efetifitas CSR dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkukngan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Perak* . Universitas Hang Tuah.(Online), (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/10208163180.pdf> , Diakses tanggal 6 September 2012)
- Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Lampung: PT Perkebunan Nusantara VII (Persero).
- Rosid, Abdul. 2008. Modul manajemen UMKM, Jakarta: Universitas Mercu Buana,(online),(pksm.mercubuana.ac.id/new, Diakses tanggal 20 September 2012).
- Wardoyo. 2005. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di Wilayah Jabotabek. Seminar nasional. Universitas Gunadarma, Depok, (Online), (<http://psp3.ipb.ac.id/>, Diakses tanggal 09 September 2012).